



BNN

2024 LAPORAN KINERJA

**BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT UTAMA BNN**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat karunia dan restu-Nya Laporan Kinerja Biro Perencanaan Settama BNN TA. 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini ditujukan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN.

Laporan Kinerja ini akan menyajikan capaian kinerja atas kinerja yang telah dimandatkan oleh Sekretaris Utama BNN kepada Kepala Biro Perencanaan Settama BNN pada awal tahun 2024. Secara umum kinerja Biro Perencanaan Settama BNN telah mencapai target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa kendala dan hambatan selama pelaksanaan tugas, namun tidak menghambat Tim Biro Perencanaan dalam menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Keberhasilan dan hambatan yang dialami akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan serta implementasi program dan kegiatan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan organisasi yang lebih baik.

Biro Perencanaan Settama BNN mengharapkan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi terkait kinerja Biro Perencanaan dan dapat bermanfaat bagi organisasi, masyarakat, maupun *stakeholder*. Kekurangan dalam laporan ini bukanlah cela, namun merupakan wadah bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Biro Perencanaan Settama BNN



Mardiharto Tjokrowasito, S.H., L.L.M.

IKTISAR CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN

Tahun 2024 merupakan periode akhir tahun perencanaan jangka menengah 2020-2024. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Biro Perencanaan Settama BNN Tahun 2024 ini tidak hanya menyajikan hasil capaian tahun 2024 namun juga membandingkan capaian selama periode tahun perencanaan jangka menengah yang telah dicapai oleh Biro Perencanaan dalam hal perencanaan penganggaran beserta analisis pencapaiannya. Pada tahun 2024 Biro Perencanaan memperoleh mandat dari Sekretaris Utama BNN berupa Sasaran Kegiatan “**Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien**” melalui **Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN**. Pada Tahun 2024, capaian kinerja Nilai NKA yang diperoleh Biro Perencanaan BNN adalah sebesar 98,15 dari target yang ditetapkan sebesar 96 (102,24%).

Meskipun capaian kinerja Biro Perencanaan Settama BNN telah melampaui target yang ditetapkan, namun Biro Perencanaan secara konsisten tetap akan meningkatkan kinerja dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan P4GN agar optimal dan tepat sasaran. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN menjadi sasaran utama yang akan diraih melalui berbagai upaya, diantaranya memperbaiki tata kelola organisasi dan manajemen kinerja melalui semangat Reformasi Birokrasi, peningkatan kompetensi pegawai BNN, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional, mensinergikan keterlibatan seluruh stakeholder dan masyarakat untuk ambil bagian dalam program P4GN, dan juga membangun budaya kerja BNN RI yang Berani, Nasionalis, Netral, Responsif, serta Inovatif.

Biro Perencanaan Settama BNN secara konsisten tetap meningkatkan kinerja ke depan dalam memberikan dukungan pelaksanaan P4GN lebih optimal dan tepat sasaran. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN menjadi sasaran utama yang akan diraih melalui berbagai upaya, diantaranya memperbaiki tata kelola organisasi dan manajemen kinerja melalui semangat Reformasi Birokrasi, peningkatan kompetensi pegawai BNN, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional, mensinergikan keterlibatan seluruh *stakeholder* dan masyarakat untuk ambil

bagian dalam program P4GN, dan juga membangun budaya kerja BNN RI yang Berani, Nasionalis, Netral, Responsif, serta Inovatif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKTISAR CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR PERSAMAAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	2
B. DASAR HUKUM	3
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	4
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. RENCANA KERJA.....	14
C. PERJANJIAN KINERJA	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	18
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	21
BAB IV. PENUTUP	23
A. KESIMPULAN	24
B. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN	24
LAMPIRAN I.....	26
LAMPIRAN II	29
LAMPIRAN III	36

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Program, Kegiatan, Sasaran, dan Target Kinerja Settama BNN Tahun 2020-2024.....	11
Tabel II.2 Sasaran, Target Kinerja, dan Kebutuhan Pendanaan.....	15
Tabel II.3 Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan Settama BNN.....	16
Tabel II.4 Target Kinerja Biro Perencanaan Settama BNN Tahun 2024	16
Tabel III.1 Capaian Kinerja Anggaran Biro Perencanaan BNN.....	19
Tabel III.2 Total Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Perencanaan BNN.....	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan Settama BNN	7
Gambar III.1 Skema Perhitungan NKA K/L 2024	18
Gambar III.2 Grafik Perbandingan Capaian NKA BNN 2020 – 2024	19

DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan III.1 Metode Perhitungan Efisiensi	21
--	----



BAB I **PENDAHULUAN**

LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN

A. GAMBARAN UMUM

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara sederhana, akuntabilitas dimaknai sebagai setiap proses dan hasil pelayanan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hingga kini, upaya akuntabilitas khususnya akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah masih menjadi salah satu prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi, demikian pula fokus BNN yang terus berupaya memperkuat aspek akuntabilitas kinerja melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendorong penerapan akuntabilitas khususnya terkait akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN sebagai tindak lanjut dari regulasi yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan diterbitkannya regulasi-regulasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja.

BNN melakukan revisi terhadap peraturan terkait Sakip, selain menyesuaikan terhadap Peraturan Menpan-RB tentang Sakip juga bertujuan untuk memberikan pedoman teknis bagi unit/satuan kerja di lingkungan BNN dalam melaksanakan sistem akuntabilitas baik terkait aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja yang disesuaikan dengan sistem pengelolaan kinerja dan struktur organisasi BNN.

Salah satu komponen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang harus dipenuhi adalah pelaporan kinerja. Dimana, setiap kebijakan yang diambil atau program/kegiatan yang dikerjakan oleh unit kerja atau lembaga pemerintah harus dilaporkan hasil dan capaiannya kepada publik atau kepada pemberi mandat. Laporan

atas hasil kerja unit kerja yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran disebut dengan Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN, Biro Perencanaan sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan BNN juga berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan selama satu tahun sekaligus mempertanggungjawabkan dukungan sumber daya yang tersedia.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
17. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
19. Rencana Strategis Sekretariat Utama BNN Tahun 2020-2024;
20. Rencana Kerja Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNN Tahun 2024.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN, dan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan. Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN;
2. Sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN;
4. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan. Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, Biro Perencanaan memiliki peranan yang sangat strategis terkait penguatan manajemen kinerja sektor publik di lingkungan BNN, baik pada tahapan perumusan strategi, penyusunan program, penyusunan anggaran, pengukuran kinerja, implementasi, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja.

Beberapa peran strategis Biro Perencanaan BNN berdasarkan tugas dan fungsinya dalam mendukung upaya pelaksanaan P4GN dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Fasilitator Pengkolaborasian Rencana Program Kerja P4GN lintas K/L

Sebagaimana tugas dan fungsi Biro Perencanaan BNN diantaranya adalah menyusun kebijakan nasional P4GN. Dalam hal ini penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN yang melibatkan partisipasi seluruh Kementerian/Lembaga dengan mengidentifikasi berbagai bentuk program kerja yang dapat diintegrasikan atau berkontribusi dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN. Dalam hal ini, posisi BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba dengan mendorong keterlibatan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan P4GN menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab Biro Perencanaan BNN. Dalam hal ini Biro Perencanaan dapat memetakan dan mengidentifikasi berbagai potensi rencana program kerja di berbagai Kementerian/Lembaga untuk dikolaborasikan dalam program kolaboratif P4GN. Program kolaboratif tersebut telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN 2020-2024.

2. Fasilitator Penguatan Sistem Manajemen Kinerja di Lingkungan BNN

Tugas lain biro perencanaan adalah mengembangkan sistem manajemen kinerja supaya dapat berjalan dengan baik di lingkungan BNN. Dalam pengembangan sistem manajemen kinerja yang baik, Biro Perencanaan mengawali dengan merancang atau menyusun beberapa dokumen perencanaan, baik rencana jangka menengah (Rencana Strategis) dan rencana jangka pendek atau tahunan (Rencana Kerja) dengan menyajikan berbagai informasi kinerja pada berbagai unit kerja baik pusat dan unit vertikal, termasuk penggunaan model *cascading* kinerja. Selain itu, mengidentifikasi klasifikasi prioritas program kerja serta mengidentifikasi kebutuhan pendanaannya.

Dalam rangka penguatan sistem manajemen kinerja, Biro Perencanaan juga melakukan pengendalian kinerja untuk memastikan bahwa program kerja BNN dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unit kerja, dan melakukan penyusunan pelaporan kinerja BNN sebagai instrumen pertanggungjawaban publik atas kinerja BNN. Peran lain yang cukup strategis adalah melakukan asistensi dan pembinaan kepada seluruh unit kerja baik pusat dan daerah terkait pelaksanaan manajemen kinerja pada masing-masing unit kerja. Terkait dengan peran pendampingan dan pembinaan ini meniscayakan adanya penguasaan atas pengetahuan dan wawasan terkait manajemen kinerja BNN pada jajaran Biro Perencanaan. Oleh karena itu, BNN juga melakukan pengembangan kapasitas aparatur terkait konsep manajemen kinerja di lingkungan BNN.

3. Fasilitator Manajemen Penganggaran BNN

Peran lainnya adalah memfasilitasi pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkungan BNN sebagai salah satu sumber daya organisasi. Terkait upaya perwujudan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran diperlukan berbagai instrumen penganggaran. Selain itu, peranan dalam manajemen penganggaran adalah untuk meningkatkan kualitas administrasi penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau perkembangan kebijakan penganggaran pemerintah. Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 01 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, struktur organisasi Biro Perencanaan Settama BNN mengalami perubahan. Perubahan struktur organisasi ini dalam rangka menyesuaikan kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh pemerintah. Dimana dalam kebijakan tersebut dilakukan penghapusan jabatan eselon III dan IV dan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional.

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 01 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Biro Perencanaan hanya terdiri dari Kepala Biro Perencanaan, pejabat fungsional dan pelaksana. Pejabat fungsional terdiri dari madya, muda dan pertama. Saat ini jenis jabatan fungsional yang telah ada di Biro Perencanaan adalah Perencana, Analis Anggaran, dan pengelola Keuangan APBN. Gambar struktur organisasi Biro Perencanaan Settama BNN sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan Settama BNN



D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi, dan Sistematika.

- Bab II Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis Settama BNN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Biro Perencanaan BNN Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan Tahun 2024.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan yang Capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024, Evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 Akuntabilitas Keuangan Biro Perencanaan Tahun 2024.
- Bab IV Penutup.



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah merupakan dokumen yang sangat penting dalam memberikan arah dan tujuan suatu instansi pemerintah. Selain pada tingkat kelembagaan, dokumen rencana strategis juga menjadi dokumen wajib yang harus tersedia pada setiap unit kerja tingkat eselon I. Kewajiban ini merupakan mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah selain juga mandat yang diatur juga dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN.

Terkait dengan ketentuan tersebut, Sekretariat Utama BNN telah merumuskan Renstra Sekretariat Utama BNN tahun 2020-2024 sebagai penjabaran Renstra BNN yang memuat tentang berbagai rumusan rencana tindakan dan kegiatan jangka menengah lima tahunan yang dirumuskan untuk diimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian misi dan tujuan organisasi, serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*) untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi organisasi.

Sejumlah permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah BNN yang perlu ditangani oleh unit kerja kesekretariatan utama diantaranya mengenai pengelolaan program reformasi birokrasi, manajemen akuntabilitas kinerja, penataan organisasi dan tata laksana, manajemen karier aparatur, peningkatan sarana prasarana perkantoran, maupun manajemen opini publik BNN. Sebagai gambaran kinerja unit sekretariat utama dan unit kerja eselon II di lingkungan sekretariat utama dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel II.1 Program, Kegiatan, Sasaran, dan Target Kinerja Settama BNN Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Unit Kerja Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan BNN	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	65	70	75	78	80	Sekretariat Utama
		Indeks Kepuasan Penyelenggara an Organisasi	80	81	82	83	84	
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	65	70	75	80	85	
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	80	82	84	86	90	Biro Perencanaan
Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan pengelolaan SDM, organisasi dan tatalaksana yang efektif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Kepegawaian	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	Biro Kepegawaian dan Ortala
		Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana	74%	78%	82%	86%	90%	
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	100	100	100	100	100	Biro Keuangan
		Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai	4	4	4	4	4	
Penyelenggaraan Ketatausahaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya pelayanan umum secara maksimal	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan	3	3,1	3,2	3,3	3,4	Biro Umum
		Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa	3	3,1	3,2	3,3	3,4	
Penyelenggaraan Kehumasan	Meningkatnya fungsi layanan	Indeks Layanan Kehumasan	3	3,5	4	4,5	5	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target					Unit Kerja Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
dan Keprotokolan	publikasi kelembagaan dan keprotokolan yang optimal	Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Keprotokolera n	80%	85%	87%	90%	92%	

Terkait dengan sejumlah tugas yang diemban Sekretariat Utama BNN, Biro Perencanaan sebagai salah satu unit kerja pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama dimandatkan untuk melakukan peningkatan proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien di lingkungan BNN, mandat ini secara tegas tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama BNN Tahun 2020-2024 sebagaimana dalam tabel di atas.

Terkait dengan tugas-tugas tersebut, Biro Perencanaan diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan manajemen kinerja pada seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BNN yang dihadapkan pada berbagai kendala, hambatan, dan dinamika organisasi BNN.

Adapun ukuran atau indikator kinerja terkait aspek akuntabilitas kinerja menggunakan indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang penilaiannya dilakukan menggunakan sistem teknologi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Penggunaan indikator ini, selain sebagai indikator yang berlaku umum di seluruh kementerian/lembaga, komponen-komponen penilaian NKA juga mencerminkan aspek-aspek akuntabilitas kinerja dan anggaran. Dimana sumber daya anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja baik berupa *output* dan *outcome*.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dilakukan Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan anggaran dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga dengan rangkaian aktivitas penilaian kinerja pelaksanaan

anggaran dan reviu atau telaah untuk masukan kebijakan pelaksanaan anggaran. Evaluasi kinerja anggaran berupa penilaian kinerja anggaran perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga, dimana Nilai Kinerja BNN digunakan sebagai indikator kinerja Biro Perencanaan Sekretariat Utama.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari:

1. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran;
2. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Hasil evaluasi kinerja anggaran digunakan sebagai:

1. salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
2. dasar penyusunan dan/atau tinjau ulang angka dasar;
3. dasar penyusunan alokasi anggaran tahun yang direncanakan dan/atau penyesuaian anggaran tahun berjalan.

Nilai Kinerja Anggaran dibagi dalam beberapa tingkatan antara lain tingkat Kementerian Negara/Lembaga, tingkat unit Eselon I, dan tingkat Satuan Kerja (Satker). Penilaian Nilai Kinerja Anggaran hasil perhitungannya tercantum pada *dashboard* masing-masing unit organisasi dalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan dengan rincian variabel dan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Nilai kinerja atas perencanaan anggaran:
 - a. Efektivitas dengan variabel Capaian RO bobot 75%;
 - b. Efisiensi dengan variabel penggunaan SBK 10% dan efisiensi SBK 15%.
2. Nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran dengan variabel: Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (15%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), pengelolaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (10%), dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan Capaian Output (25%).

B. RENCANA KERJA

Arah kebijakan dan strategi Biro Perencanaan merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan strategi Settama BNN Tahun 2024 yang didasarkan pada Rencana Strategis Settama BNN 2020–2024 dan dirumuskan sebagai pendekatan dalam menyelesaikan isu/permasalahan tahun 2024. Adapun arah kebijakan Settama yang harus dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Settama BNN adalah Arah Kebijakan terkait "*Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja BNN*". Arah kebijakan tersebut ditetapkan untuk mengatasi isu/permasalahan di bidang akuntabilitas dan pengelolaan anggaran. Strategi yang dipilih dalam mewujudkan arah kebijakan tersebut ditempuh dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. peningkatan kapabilitas dan kapasitas manajemen kinerja di semua unit organisasi BNN;
2. penjenjangan kinerja di lingkungan Biro Perencanaan;
3. penyusunan dokumen sistem akuntabilitas, mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja;
4. penyelarasan data dan informasi kinerja pada dokumen perencanaan;
5. penguatan akuntabilitas di Biro Perencanaan;
6. membangun budaya kerja di Biro Perencanaan.

Selain penguatan sistem akuntabilitas kinerja BNN, Biro Perencanaan juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan terkait "Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), dimana pada tahun 2024 Biro Perencanaan masih ditetapkan sebagai sekretariat dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi BNN.

Biro Perencanaan Settama BNN menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, dengan tetap mempedomani Renja BNN Tahun 2024. Adapun gambaran rencana program kerja Biro Perencanaan Settama BNN dalam satu tahun mendatang dengan sasaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan Biro Perencanaan Settama BNN Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.2 Sasaran, Target Kinerja, dan Kebutuhan Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (RIBU)
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	93	12.213.314.000

Penetapan target kinerja sebesar 93 didasarkan atas capaian tahun 2022 karena penyusunan target tersebut dilakukan pada tahun perencanaan dimana realisasi tahun 2024 belum diperoleh. Jadi target kinerja masih bersifat estimasi dan akan dikoreksi pada saat penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

C. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Renstra Sekretariat Utama BNN 2020-2024, mandat rencana target kinerja yang diamanahkan kepada Kepala Biro Perencanaan terkait peningkatan nilai kinerja anggaran (NKA) BNN adalah nilai 80 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi nilai 90 pada tahun 2024. Perumusan target ini menunjukkan adanya upaya laju peningkatan nilai sebesar 2 poin pada setiap tahun, kecuali untuk tahun 2024 ada kenaikan 4 poin.

Namun perencanaan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Settama tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi aktualnya. Dimana capaian NKA tahun 2020 sebesar 92,10. Pengukuran NKA oleh kementerian keuangan terus berkembang menyesuaikan beberapa kebutuhan dan pertimbangan sejumlah variabel serta perubahan formula perhitungan NKA. Terakhir, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Gambaran tren pencapaian kinerja NKA BNN dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.3 Target dan Realisasi Kinerja Biro Perencanaan Settama BNN

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	90	92,10	102,3%
2021	92	93,69	101,8%
2022	93	94,62	101,7%
2023	94	95,70	101,81%

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2021, target NKA yang ditetapkan Biro Perencanaan sebesar 92 dan realisasi NKA BNN sebesar 93,69 (berkategori sangat baik dengan nilai >90) atau capaian realisasi mencapai 101,84% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 juga diperoleh perbandingan antara realisasi dan target mencapai 101,7%, sedangkan pada tahun 2023 target NKA yang ditetapkan sebesar 94 dan realisasi NKA BNN sebesar 95,70 (berkategori sangat baik) atau capaian realisasi mencapai 101,81% dari target yang ditetapkan. Artinya, selama ini target kinerja (angka NKA) yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan telah cukup baik atau realistis sesuai dengan tren capaian kinerja dan kapabilitas organisasi. Oleh karena itu, Kepala Biro Perencanaan pada tahun 2024 menyusun kontrak kinerja sebagaimana dalam perjanjian kinerja yang telah disepakati atau disetujui Sekretaris Utama BNN sebagai berikut:

Tabel II.4 Target Kinerja Biro Perencanaan Settama BNN Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN	96



BAB III

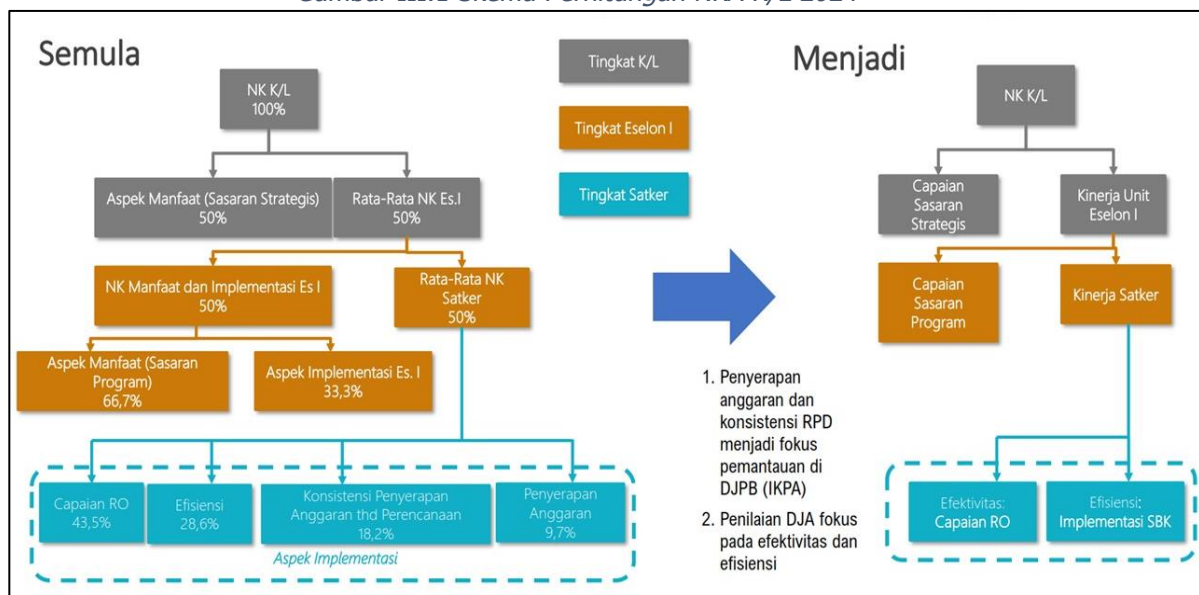
AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tingkat lembaga merupakan nilai kumulatif dari capaian Nilai Kinerja Anggaran seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BNN dari unit kerja tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/kota. Sehingga upaya pengoordinasian dan pengendalian sangat penting agar NKA dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Apabila pembinaan dan pengendalian tidak dilakukan dengan baik atau terabaikan, maka potensi kesalahan *input* atau keterlambatan *input* data kinerja dan anggaran pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi Monev SMART Kementerian Keuangan sangat mempengaruhi penilaian NKA. Pada tahun 2024, terjadi perubahan metodologi perhitungan NKA sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023, dengan skema sebagai berikut:

Gambar III.1 Skema Perhitungan NKA K/L 2024



Dengan adanya perubahan metode tersebut, Biro Perencanaan tetap berupaya memastikan seluruh unit/satuan kerja dapat mengelola dan memasukkan data kinerja dan anggaran pada aplikasi SMART tersebut dengan cermat dan tepat, selain itu pemahaman yang baik terkait manajemen kinerja juga sangat penting dimiliki para jajaran di kewilayahan khususnya di kalangan pelaksana fungsi perencanaan dan penganggaran pada setiap satuan kerja ataupun termasuk kalangan pengelola aplikasi SMART. Meskipun terdapat perubahan metode penilaian namun Biro

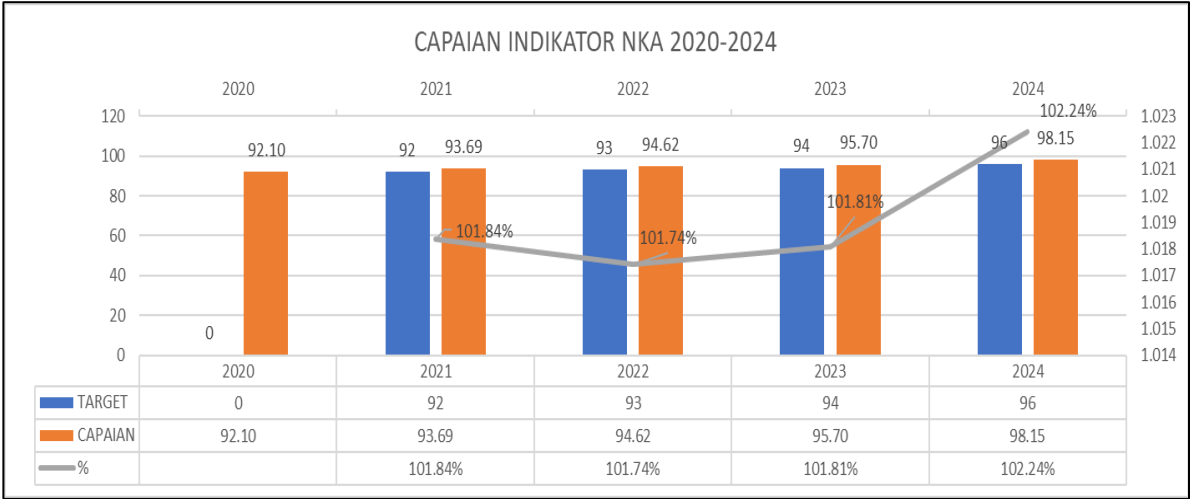
Perencanaan tetap berupaya untuk mengadaptasi dan meningkatkan kinerjanya, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan nilai NKA pada tahun 2024 sebesar 98,15 (berkategori Sangat Baik) atau dengan capaian sebesar 102,24% dari target yang ditetapkan yakni 96 Sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Capaian Kinerja Anggaran Biro Perencanaan BNN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	%
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN	96	98,15	102,24%

Realisasi NKA tahun 2024 sebesar 98,15 apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 pada dokumen Renstra sebesar 90, maka kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya pada periode Renstra juga mengalami tren kenaikan sebagaimana gambar berikut:

Gambar III.2 Grafik Perbandingan Capaian NKA BNN 2020 – 2024



Capaian NKA Tahun 2024 yang telah dicapai oleh BNN sebesar 98,15 bila dibandingkan dengan nilai rata-rata NKA nasional tingkat kementerian/lembaga tahun 2024 sebesar 88 juga telah melebihi meskipun nilai rata-rata nasional tersebut belum final dan baru akan dipublikasikan pada akhir Februari 2025. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Biro Perencanaan

Settama BNN dalam melakukan pembinaan, asistensi, dan koordinasi baik dengan jajaran internal BNN maupun pihak eksternal (Kementerian Keuangan). Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya peningkatan pemahaman para jajaran pengelola kinerja di unit kerja terkait rumusan informasi kinerja sesuai dengan pembaharuan konsep kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diadaptasi secara seksama dalam konteks bentuk lembaga BNN yang bersifat vertikal. Selain itu, unit kerja juga berupaya meningkatkan pemahaman terkait nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran dalam meningkatkan NKA sebagai hasil evaluasi kinerja anggaran (Sebagaimana PMK Nomor 62 Tahun 2023).

Keberhasilan BNN dalam meningkatkan NKA juga tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dalam memfasilitasi seluruh satuan unit kerja untuk menginternalisasi hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dalam meningkatkan *awareness* dan *compliance* dari masing-masing unit kerja terkait pengisian capaian kinerja melalui Aplikasi SAKTI dan Aplikasi SMART. Adapun upaya lain yang dilakukan oleh Biro Perencanaan yaitu melakukan evaluasi secara periodik terkait perkembangan realisasi kinerja dan anggaran.

Meskipun upaya-upaya telah dilakukan untuk meningkatkan nilai NKA dan capaian selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain:

1. Seluruh perhitungan variabel dan bobot yang menghasilkan NKA dihitung secara sistem yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan sehingga unit kerja tidak dapat mengetahui faktor dan variabel mana yang masih butuh perbaikan karena seluruh perhitungan diambil secara integrasi dari Aplikasi SAKTI ke SMART Kementerian Keuangan.
2. Walaupun terdapat formulasi perhitungan dalam aplikasi namun Biro Perencanaan tidak memiliki akses khusus untuk mengetahui data secara rinci pembentuk nilai NKA sehingga Biro Perencanaan terkendala dalam melakukan pembinaan terhadap unit kerja. Untuk mengetahui efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang dihasilkan salah satunya

dengan membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan penggunaan anggaran, menggunakan formulasi sebagai berikut:

Persamaan III.1 Metode Perhitungan Efisiensi

$$Efisiensi = 1 - \left(\frac{\text{realisasi anggaran} / \text{realisasi kinerja}}{\text{pagu anggaran} / \text{target kinerja}} \right) \times 100$$

Apabila dilakukan analisis menggunakan metode perhitungan, efisiensi penggunaan sumber daya Biro Perencanaan menggunakan data berikut:

- a. pagu = Rp7,051,340,000
- b. realisasi = Rp6,630,625,501
- c. target kinerja NKA = 96
- d. realisasi kinerja NKA = 98,15
- e. n = jumlah indikator

maka dihasilkan nilai efisiensi sebesar 8,03 artinya tingkat efisiensi positif dan cukup tinggi untuk pencapaian kinerja indikator NKA dengan menggunakan anggaran yang ada.

Adapun efisiensi sumber daya dalam bentuk yang lain diantaranya digitalisasi konsep kegiatan perencanaan kinerja dan anggaran melalui Aplikasi KRISNA dan e-Kinerja BNN, penyampaian pelaporan kinerja dan anggaran melalui Aplikasi e-Monev Bappenas dan Aplikasi SAKTI, pelaksanaan anggaran melalui Aplikasi SAKTI serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan metode *hybrid* melalui rapat pimpinan yang dihadiri oleh para pimpinan pusat sampai kewilayahan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Rencana Kerja BNN tahun 2024, Biro Perencanaan mendapat alokasi anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 Satker Sekretariat Utama BNN Nomor: SP DIPA-066.01.1.681595/2024 tanggal 24 November 2024 sebesar Rp8,359,793,000,- Anggaran tersebut untuk membiayai seluruh kegiatan yang terbagi dalam dua output

yaitu Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Besaran anggaran tersebut mengalami beberapa kali perubahan dengan adanya blokir *Automatic Adjustment*, relaksasi *Automatic Adjustment*, dan pergeseran antar kegiatan dilingkungan Settama maka pagu akhir Biro Perencanaan menjadi Rp7,869,484,000,-

Meskipun terdapat beberapa kali pergeseran anggaran akibat kebijakan pemerintah, namun Biro Perencanaan tetap berhasil dalam mencapai target kerja output yang menjadi tanggungjawab Biro Perencanaan sebesar 100%, baik output Layanan Perencanaan dan Penganggaran maupun Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan realisasi sebesar Rp6,630,625,501,- (84,26%) dengan sisa anggaran sebesar Rp1,238,858,499,- yang mana sisa anggaran tersebut terdapat anggaran sebesar Rp818,144,000,- yang diblokir 50% dari sisa anggaran perjalanan dinas TA 2024 sebagaimana kebijakan pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024.

Dengan adanya kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah melalui penghematan anggaran dan keberhasilan dalam mencapai target output berarti Biro Perencanaan telah melakukan efisiensi sumberdaya. Berikut realisasi anggaran Biro Perencanaan Settama BNN pada masing-masing output/rincian output (RO) setelah dikurangi pagu penghematan 50% sisa perjalanan dinas TA 2024:

Tabel III.2 Total Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Perencanaan BNN

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%
3238.EBD	Biro Perencanaan	7,051,340,000	6,630,625,501	94.03%
3238.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,751,139,000	4,506,594,279	94.85%
3238.EBD.953	Layanan Monitoring dan Evaluasi	2,300,201,000	2,124,031,222	92.34%



BAB IV **PENUTUP**

LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja dan penganggaran di lingkungan BNN baik melalui upaya pembinaan, asistensi, dan koordinasi yang berkorelasi positif terkait peningkatan nilai kinerja anggaran BNN. Berbagai upaya tersebut untuk menghadapi dinamika kebijakan perencanaan dan penganggaran baik yang berasal dari kebijakan internal BNN maupun kebijakan pemerintah yang perlu diadaptasi oleh BNN.

Realisasi penyerapan anggaran Biro Perencanaan Settama BNN tahun 2024 sebesar 94,03%, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran dan kegiatan Biro Perencanaan sudah sangat baik dan telah dilakukan secara maksimal. Meskipun demikian, nilai kinerja anggaran BNN masih diperlukan perbaikan-perbaikan di beberapa aspek antara lain aspek pencapaian efisiensi pengelolaan anggaran, memformulasi nilai atau harga *output* kegiatan, dan pemahaman atau pengelolaan informasi kinerja secara menyeluruh pada setiap pegawai.

B. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Perencanaan Settama BNN sesuai hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2024 serta masukan dari berbagai pihak, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, yaitu:

1. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur yang menangani bidang perencanaan maupun penganggaran baik pada unit kerja tingkat pusat dan unit kerja vertikal terkait substansi konsep manajemen kinerja dan manajemen penganggaran secara komprehensif, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dengan lebih baik dalam hal merumuskan perencanaan program kerja yang efektif dan efisien dengan standar ukuran yang rasional dan obyektif serta mampu menjadi agen perubahan pada aspek perencanaan program kerja dan penganggaran.
2. Intensifikasi pembinaan dan pendampingan/asistensi secara terpadu, sistematis dan terstruktur dan tepat sasaran, hal tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki nilai NKA pada unit kerja yang masih berada di bawah rata-rata sekaligus untuk

mewujudkan upaya *transfer of knowledge* kepada sejumlah aparaturnya yang dimutasi menjadi pelaksana fungsi perencanaan dan penganggaran.

3. Perlu pendalaman konsep kinerja secara substansial dan perlu adanya inisiasi perumusan harga/nilai kinerja *output* berdasarkan kondisi wilayah sekaligus perumusan nilai kontribusi *output* terhadap kinerja *outcome*. Meskipun hal ini merupakan upaya yang tidak mudah dan membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang kompleks dan komprehensif.

Jakarta, Januari 2025

Kepala Biro Perencanaan Settama

BNN



Mardiharto Tjokrowasito, S.H., L.L.M.



LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN

LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN



PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2024

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARDIHARTO TJOKROWASITO, S.H., L.L.M.
Jabatan : KEPALA BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TANTAN SULISTYANA, S.H., S.I.K., M.M.
Jabatan : SEKRETARIS UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,
**SEKRETARIS UTAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Pihak Pertama,
**KEPALA BIRO PERENCANAAN
SETTAMA BNN**

TANTAN SULISTYANA, S.H., S.I.K., M.M.

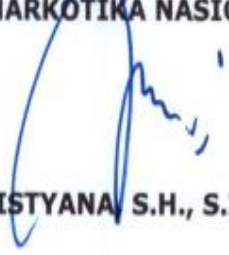
**MARDIHARTO TJOKROWASITO,
S.H., L.L.M.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PERENCANAAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	96 Indeks

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN Rp.12.213.314.000

Pihak Kedua,
**SEKRETARIS UTAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**


TANTAN SULISTYANA S.H., S.I.K., M.M.

Surabaya, 06 Maret 2024
Pihak Pertama,
**KEPALA BIRO PERENCANAAN
SETTAMA BNN**


**MARDIHARTO TJOKROWASITO,
S.H., L.L.M.**



LAMPIRAN II

HASIL PENGUKURAN KINERJA NKA BNN

LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN

Tangkapan Layar Nilai Kinerja Anggaran BNN Tahun 2024 dari Aplikasi SMART Kementerian Keuangan

[Download Excel](#)

Tampilkan

25

entri

Cari:

No.	Kode Kementerian/Lembaga	Kementerian Lembaga	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	98,41	97,88	98,15

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya

1

Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-17 08:39:34

[Download Excel](#)

Tampilkan

25

entri

Cari:

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	066.01	Badan Narkotika Nasional	98,39	97,88	98,14

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya

1

Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-17 08:40:29

Tampilkan entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	015406	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN	100,00	96,35	98,18
2	015515	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA TIMUR	100,00	99,57	99,79
3	020558	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOGOR	100,00	99,90	99,95
4	020761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIANJUR	100,00	99,82	99,91
5	025137	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDUNG	100,00	99,97	99,99
6	025447	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON	100,00	99,97	99,99
7	026118	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIMAHI	100,00	100,00	100,00
8	031963	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MAGELANG	99,06	99,63	99,35
9	032057	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG	100,00	100,00	100,00
10	035665	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA	100,00	98,18	99,09
11	040173	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BARTUL	100,00	100,00	100,00
12	040256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN	100,00	100,00	100,00
13	045165	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA	100,00	99,96	99,98
14	052858	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TUBAH	100,00	98,49	99,25
15	060534	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ACEH SELATAN	99,90	99,96	99,93
16	061331	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GAYO LUES	97,86	99,48	98,67
17	061816	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PIDIE JAYA	100,00	99,98	99,99
18	065137	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH	100,00	99,16	99,58
19	070258	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KABO	99,93	99,98	99,96
20	070645	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN	100,00	100,00	100,00
21	070639	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	100,00	93,65	96,83
22	072117	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATU BARA	100,00	99,65	99,83
23	075345	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI	100,00	98,61	99,31
24	075540	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANJUNG BALAI	100,00	99,96	99,98
25	081140	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASAMAN BARAT	97,71	96,21	96,96
26	091236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	100,00	97,95	98,98
27	111079	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	100,00	97,21	98,61
28	120855	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN WAY KANAN	100,00	99,60	99,80
29	130761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BENGKAYANG	100,00	99,92	99,96
30	145161	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA	99,25	98,74	99,00
31	150243	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANAH LAUT	100,00	98,80	99,40
32	150751	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TABALONG	100,00	97,61	98,81
33	150958	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	100,00	99,86	99,93
34	165162	Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah	83,22	97,12	90,17
35	165249	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BALIKPAPAN	100,00	100,00	100,00
36	165352	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN	100,00	98,92	99,46
37	165441	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BONTANG	100,00	99,79	99,90
38	190633	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANAH TORAJA	100,00	99,78	99,89
39	195175	Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Boddoka	91,13	98,64	94,89
40	205232	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BAWU BAWU	100,00	96,49	98,25
41	220155	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BULELENG	100,00	100,00	100,00
42	220348	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG	100,00	100,00	100,00
43	220547	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARANGASEN	100,00	100,00	100,00
44	295420	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN	98,00	99,46	98,73
45	310151	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GORONTALO	100,00	92,66	96,33

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
46	310721	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GORONTALO UTARA	100,00	96,71	98,36
47	320223	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARINUN	100,00	99,98	99,99
48	325136	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATAM	100,00	99,24	99,62
49	352628	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN	75,00	94,34	84,67
50	352629	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	78,75	94,19	86,47
51	403708	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	100,00	99,61	99,81
52	403709	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	100,00	96,70	98,35
53	403710	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DUMAI	100,00	95,74	97,87
54	403711	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG	100,00	100,00	100,00
55	403713	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANGKA SELATAN	96,06	95,78	95,92
56	403714	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG	100,00	96,95	98,48
57	403715	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASURUAN	100,00	97,57	98,79
58	403716	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR	95,99	98,39	97,19
59	403717	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	87,55	97,49	92,52
60	418305	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ACEH TAMIANG	100,00	99,06	99,53
61	418307	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PIDIE	100,00	97,91	98,96
62	418308	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEBING TINGGI	100,00	99,96	99,98
63	418309	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK	100,00	99,73	99,87
64	418310	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM	100,00	96,26	98,13
65	418311	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUSI BAWAS	100,00	98,84	99,42
66	418313	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BENGKULU	100,00	98,37	99,19
67	418315	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	100,00	96,91	98,46
68	418316	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO	100,00	99,70	99,85
69	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	100,00	100,00	100,00
70	418318	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TASIKMALAYA	100,00	96,45	98,23
71	418319	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA	99,51	99,89	99,70
72	418320	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUNUKAN	100,00	97,84	98,92
73	418322	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	100,00	98,49	99,25
74	418323	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGHE	100,00	100,00	100,00
75	418324	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA	100,00	98,99	99,50
76	418537	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Batam Kepulauan Riau	93,67	98,03	95,85
77	418542	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Kalianda Lampung Selatan	91,05	97,33	94,19
78	419175	Badan Narkotika Nasional Kota Sabang	100,00	97,92	98,96
79	419176	Badan Narkotika Nasional Kota Gunungrejo	97,74	95,07	96,41
80	419177	Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto	100,00	98,90	99,45
81	419202	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir	100,00	96,79	98,40
82	419203	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	100,00	96,47	98,24
83	419222	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan	96,09	96,83	96,46
84	419223	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan	100,00	96,90	98,45
85	419224	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus	100,00	97,47	98,74
86	419225	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka	100,00	97,82	98,91
87	419226	Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon	100,00	98,86	99,43
88	419227	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi	100,00	100,00	100,00
89	419228	Badan Narkotika Nasional Kota Tegay	100,00	99,03	99,52
90	419246	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas	100,00	100,00	100,00
91	419247	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep	100,00	96,36	98,18
92	419248	Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto	100,00	100,00	100,00
93	419249	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SINTANG	99,86	98,37	99,12

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
94	419256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	100,00	99,90	99,95
95	419257	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala	100,00	97,64	98,82
96	419258	Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara	100,00	95,89	97,95
97	419259	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow	100,00	97,53	98,77
98	419260	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone	100,00	99,79	99,90
99	419261	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan	100,00	97,18	98,59
100	419261	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna	100,00	97,86	98,93
101	419263	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOALEMO	100,00	94,95	97,48
102	419264	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima	99,48	99,85	99,67
103	419265	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu	100,00	99,90	99,95
104	419276	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buru Selatan	100,00	96,68	98,34
105	419280	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai	99,40	97,30	98,35
106	419286	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika	100,00	96,40	98,20
107	648961	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	75,00	98,04	86,52
108	670688	BALAI BESAR REHABILITASI BNN	88,09	94,87	91,48
109	681199	SEKRETARIAT UTAMA	75,00	98,46	86,73
110	681600	INSPEKTORAT UTAMA	75,00	95,61	85,31
111	681617	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	75,00	95,87	85,44
112	681621	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	75,00	94,98	84,99
113	681638	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	74,01	88,63	81,32
114	681642	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	75,00	87,94	81,47
115	681659	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	93,75	91,61	92,68
116	682448	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA	100,00	96,91	98,46
117	682452	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN	100,00	98,03	99,02
118	682469	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT	100,00	98,70	99,35
119	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	96,78	99,22	98,00
120	682480	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	100,00	99,64	99,82
121	682494	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	100,00	99,93	99,97
122	682503	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG	100,00	99,61	99,81
123	682516	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI	99,97	99,88	99,93
124	682520	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	99,52	99,89	99,71
125	682537	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	99,43	89,56	94,50
126	682541	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	100,00	99,95	99,98
127	682558	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU	99,60	96,02	97,81
128	682562	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	99,45	98,67	99,06
129	682579	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA	100,00	98,71	99,36
130	682581	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT	99,17	99,00	99,09
131	682596	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI	100,00	98,43	99,22
132	682605	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU	100,00	97,93	98,97
133	682612	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	97,55	97,08	97,32
134	682626	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	100,00	99,78	99,89
135	682630	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	98,21	97,72	97,97
136	682647	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	100,00	98,76	99,38
137	682651	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100,00	97,35	98,68
138	682668	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100,00	99,95	99,98
139	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	100,00	99,95	99,98
140	682680	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	100,00	97,74	98,87
141	682693	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	100,00	98,48	99,24

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
142	682701	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	97,23	97,72	97,48
143	682715	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO	100,00	98,92	99,46
144	682722	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT	97,77	97,47	97,62
145	682736	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU	98,69	94,81	96,75
146	682740	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA	100,00	97,67	98,84
147	682757	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA	100,00	93,83	96,92
148	682761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	96,66	96,19	96,43
149	682778	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GARUT	100,00	100,00	100,00
150	682782	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN	100,00	99,99	100,00
151	682799	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS	100,00	99,88	99,94
152	682804	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CILACAP	100,00	97,72	98,86
153	682811	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KENDAL	100,00	99,99	100,00
154	682825	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG	100,00	97,39	98,70
155	682832	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATU	100,00	98,57	99,29
156	682846	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG	100,00	100,00	100,00
157	682850	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK	100,00	100,00	100,00
158	682867	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAH	100,00	100,00	100,00
159	682871	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LHOSEUMAWE	99,84	99,96	99,90
160	682888	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LANGSA	100,00	100,00	100,00
161	682892	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAGARALAN	99,67	96,42	98,05
162	682900	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU	100,00	99,97	99,99
163	682914	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN EMPAT LAWANG	100,00	99,98	99,99
164	682921	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG	100,00	99,96	99,98
165	682936	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEMATANG SIANTAR	99,90	98,97	99,44
166	682942	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT	98,88	97,12	98,00
167	682956	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAKSIKUMBUH	99,98	99,94	99,96
168	682960	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PANGKAL PINANG	100,00	97,65	98,83
169	682977	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANJUNG PINANG	99,51	99,88	99,70
170	682981	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK	97,28	98,15	97,72
171	682998	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG	97,21	96,12	96,67
172	683000	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARHASIN	100,00	96,16	98,08
173	683011	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARBARU	100,00	100,00	100,00
174	683025	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA	100,00	98,00	99,00
175	683032	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MOROWALI	97,01	96,02	96,52
176	683046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	100,00	100,00	100,00
177	683050	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOLAKA	100,00	98,29	99,15
178	683067	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA	100,00	99,45	99,73
179	683068	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIREUEN	100,00	99,88	99,94
180	683051	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ASAHAN	100,00	99,93	99,97
181	683065	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MANGAILING NATAL	100,00	99,69	99,85
182	683072	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN	99,69	94,36	97,03
183	683086	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	100,00	99,69	99,85
184	683090	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PRABUMULIH	100,00	98,45	99,23
185	683098	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI	100,00	97,10	98,55
186	683112	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANGHARI	75,00	98,24	86,62
187	683125	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU	100,00	98,53	99,27
188	683133	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	100,00	100,00	100,00
189	683140	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SELITUNG	100,00	99,30	99,65

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
142	682703	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	97,23	97,72	97,48
143	682715	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO	100,00	98,92	99,46
144	682722	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT	97,77	97,47	97,62
145	682736	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU	98,69	94,81	96,75
146	682740	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA	100,00	97,67	98,84
147	682757	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA	100,00	93,83	96,92
148	682761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	96,66	96,19	96,43
149	682778	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GARUT	100,00	100,00	100,00
150	682782	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN	100,00	99,99	100,00
151	682799	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS	100,00	99,88	99,94
152	682804	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CILACAP	100,00	97,72	98,86
153	682811	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KENDAL	100,00	99,99	100,00
154	682825	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG	100,00	97,39	98,70
155	682832	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATU	100,00	98,57	99,29
156	682846	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG	100,00	100,00	100,00
157	682850	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK	100,00	100,00	100,00
158	682867	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM	100,00	100,00	100,00
159	682871	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LHOKSEUMAWE	99,84	99,96	99,90
160	682888	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LANGSA	100,00	100,00	100,00
161	682892	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAGARALAM	99,67	96,42	98,05
162	682900	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU	100,00	99,97	99,99
163	682914	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN EMPAT LAWANG	100,00	99,98	99,99
164	682921	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG	100,00	99,96	99,98
165	682935	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEMATANG SIANTAR	99,90	98,97	99,44
166	682942	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT	98,88	97,12	98,00
167	682956	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH	99,98	99,94	99,96
168	682960	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PANGKAL PINANG	100,00	97,65	98,83
169	682977	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANJUNG PINANG	99,51	99,88	99,70
170	682981	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK	97,28	98,15	97,72
171	682998	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG	97,21	96,12	96,67
172	683000	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARMAHIN	100,00	96,16	98,08
173	689011	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARBARU	100,00	100,00	100,00
174	689025	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA	100,00	98,00	99,00
175	689032	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MOWALI	97,01	96,02	96,52
176	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	100,00	100,00	100,00
177	689050	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOLAKA	100,00	98,29	99,15
178	689067	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA	100,00	99,45	99,73
179	689444	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIREUEN	100,00	99,88	99,94
180	689451	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ASAHAN	100,00	99,93	99,97
181	689465	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL	100,00	99,69	99,85
182	689472	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN	99,69	94,36	97,03
183	689486	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SERDANG BEDAGH	100,00	99,69	99,85
184	689490	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PRABUMULIH	100,00	98,45	99,23
185	689508	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI	100,00	97,10	98,55
186	689512	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANGHARI	75,00	98,24	86,62
187	689529	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU	100,00	98,53	99,27
188	689533	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	100,00	100,00	100,00
189	689540	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG	100,00	99,30	99,65



LAMPIRAN III

MONITORING SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM, DAN OUTPUT PROGRAM

LAPORAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN SETTAMA BNN

Monitoring Capaian Sasaran Strategis BNN TA 2024

sakti
Selasa, 4 Februari 2025 13:21:20 (Waktu Server)
SEKRETARIAT UTAMA
DANI FIRMANSYAH
321606*****0017
OPERATOR KEMENTERIAN 681595 2024

Pelaporan Level Outcome ISS

Tahun
Anggaran*
BA
2024
066
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Indikator Sasaran Strategis

Tambah ISS

NO	PERIODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET ISS (VOLUME)	PERSENTASE REALISASI ISS (%)	KETERANGAN	STATUS	TGL UPDATE	ACTION
1	Tahunan	01 - Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	01 - Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	56,39	101.72%	Hasil pengukuran Indeks P4GN tingkat nasional Tahun 2024 adalah sebesar 65.1 dari target pada Perjanjian Kinerja Kepala BNN sebesar 64,00	Submit Capaian ISS	2025-01-08 16:28:14	
2	Tahunan	02 - Terwujudnya manajemen organisasi profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	01 - Indeks reformasi birokrasi	81	98.68%	Estimasi Indeks RB 2024 = 75. Target PK = 76. Estimasi menimbang nilai indikator penilaian instansi Meso: 9 dari 24 indikator mengalami kenaikan dari 2023 dan melebihi target	Submit Capaian ISS	2025-01-13 08:34:46	

sakti | Version

Monitoring Capaian Sasaran Program BNN TA 2024

sakti

Selasa, 4 Februari 2025 13:22:35 (Waktu Server)

SEKRETARIAT UTAMA

DANI FIRMANSYAH

321606*****0017

OPERATOR KEMENTERIAN 681595 2024

Pelaporan Level Outcome IKP

Tahun Anggaran*

2024

BA

066.01

Badan Narkotika Nasional

Program

066.01.BL

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Indikator Kinerja Program

NO	PERIODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET IKP (VOLUME)	PERSENTASE REALISASI IKP (%)	KETERANGAN	STATUS	TGL UPDATE	ACTION
2	Tahunan	rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan	renovasi yang mengaimi peningkatan kualitas hidup	65	125.91%	IKP	Dikonfirmasi	09:15:41	
3	Tahunan	04 - Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	01 - Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diungkap	35	147.37%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-10 09:14:04	
4	Tahunan	05 - Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	01 - Indeks Layanan Hukum Bidang P4GN	4	98.5%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-08 16:25:47	
5	Tahunan	01 - Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	01 - Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Tinggi	100%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-10 16:26:57	
6	Tahunan	02 - Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	01 - Jumlah Kabupaten/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	150	113.33%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-08 16:24:50	
7	Tahunan	04 - Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	02 - Persentase penyelesaian penyidikan TPPU tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	100	90%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-08 16:25:06	
8	Tahunan	05 - Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional	02 - Persentase Efektifitas kerjasama nasional dan internasional	100	107.86%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-08 16:26:23	

sakti

Version

sakti | Version

sakti

Selasa, 4 Februari 2025 13:23:25 (Waktu Server)

SEKRETARIAT UTAMA

7

DANI FIRMANSYAH

321606*****0017

OPERATOR KEMENTERIAN 681595 2024

Pelaporan Level Outcome IKP

Tahun Anggaran*

2024

BA

066.01

Badan Narkotika Nasional

Program

066.01.WA

Program Dukungan Manajemen

Indikator Kinerja Program

NO	PERIODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET IKP (VOLUME)	PERSENTASE REALISASI IKP (%)	KETERANGAN	STATUS	TGL UPDATE	ACTION
1	Tahunan	01 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional	04 - Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	85	107.95%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-10 09:11:24	
2	Tahunan	01 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional	01 - Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	80	97.18%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-13 08:48:24	
3	Tahunan	02 - Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	02 - Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	4	100%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-10 09:12:56	
4	Tahunan	02 - Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	03 - Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	100%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-08 15:12:12	
5	Tahunan	01 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional	03 - Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	84	100%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-13 08:48:29	
6	Tahunan	02 - Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	01 - Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM	15	300%	Update Manual IKP	Capaian Dikonfirmasi	2025-01-13 08:42:26	